



Judul : DPR Soal Pilot Susi Air Sudah 12 Hari Disandera KKB : Dukungan Langkah Persuasif, Siapkan Penegakan Hukum
Tanggal : Senin, 20 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Soal Pilot Susi Air Sudah 12 Hari Disandera KKB Dukung Langkah Persuasif, Siapkan Penegakan Hukum

Pilot Pesawat Susi Air Philips Merthens masih disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Pencarian besar-besaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap pilot asal Selandia Baru itu masih berlanjut hingga saat ini.

ANGGOTA Komisi I DPR Christina Aryani optimistis, TNI/Polri mampu membebaskan sang pilot. TNI/Polri diyakini memiliki strategi terukur agar pendekatan persuasif yang dilakukan berhasil dengan baik tanpa adanya korban jiwa.

"Kami memberikan dukungan moral untuk TNI/Polri di lapangan yang bersama Polri sedang mengupayakan pembebasan pilot Susi Air," ujar Christina dalam keterangannya, kemarin.

Berbekal pengalaman dan latihan selama ini, aparat bakal mampu menjalankan tugas pembebasan Pilot Susi Air dengan baik pada waktunya.

Menurut Christina, langkah Pemerintah dan juga Panglima TNI untuk mengedepankan pendekatan persuasif sudah sangat tepat.

"Kuncinya memang persuasif. Jangan sampai jatuh korban yang hanya menimbulkan efek dan dampak buruk bagi solusi masalah Papua," imbuh politikus Golkar ini.

Terkait video dari KKB yang beredar luas bersama pilot Susi Air yang disandera, semua pihak tidak perlu membangun narasi dan memberi respons berlebihan.

"TNI/Polri saya sangat yakin mampu mengelola situasi dengan baik. Kita sama-sama berharap

operasi pembebasan Pilot Susi Air berhasil dengan baik," harap dia.

Sementara, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri tengah mengupayakan dua cara pendekatan untuk mengetahui posisi Kapten Philip yang disandera KKB. Pertama, melakukan monitior dan kedua dengan mengirim tim negosiasi.

"Cara kedua ini, kita belum mendapat informasi dari tim negosiasi," ungkapnya.

Menurut Fakhiri, saat ini pihaknya masih berasumsi Kapten Philip disandera KKB. Namun, informasi tersebut haruslah dibuktikan lewat laporan dari tim negoisasi. Nantinya, bila pihak kepolisian sudah mendapat informasi dari tim negosiasi akan disinkronisasikan dengan video yang menyatakan Kapten Philip ini benar disandera KKB.

"Dari situ kita harap bisa mendapat titik pasti di mana Kapten

Philip ini berada, sehingga langkah selanjutnya bisa segera kita laksanakan," jelasnya.

Fakhiri menegaskan, jika langkah negosiasi untuk membebaskan Kapten Philip gagal, aparat keamanan akan mengambil langkah penegakan hukum. Saat ini, pihaknya sedang menunggu tim negosiasi bekerja.

"Tapi mengedepankan hak asasi manusia dan yang utama adalah keselamatan pilot," tandasnya.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa menambahkan, upaya penyelamatan Pilot Susi Air Kapten Philip saat ini masih mengedepankan dialog yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Nduga.

"Apabila tetap tidak membuahkan hasil, aparat akan melakukan upaya penegakan hukum," tegas Saleh dalam keterangannya,

kemarin.

Namun, Saleh mengaku tidak bisa memutuskan batas waktu dialog, karena ini hal yang harus dirahasiakan.

"Tapi, apabila tiba waktunya, maka TNI-Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum secara terukur, terpilih serta terarah," tegasnya.

Saleh memastikan tim gabungan TNI-Polri telah menyiapkan anggota terbaiknya untuk melakukan tindakan penegakan hukum itu.

"Kita sudah bekal dan sudah diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, antara lain penegakan HAM," kata dia.

Seperti diketahui, KKB menyandera Kapten Philip usai pesawat milik maskapai Susi Air dibakar di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa (7/2). ■ TIF